



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

— TAHUN 2024 —

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJAR

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Letjen Suwanto No.1, Kota Banjar, Jaw. Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam kurun waktu tahun 2024. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 secara keseluruhan difasilitasi oleh 3 Program dengan 19 Kegiatan, dan 60 Sub Kegiatan, yang bersumber dari APBD Kota Banjar. Upaya perbaikan kinerja terus dilakukan melalui berbagai pendekatan koordinasi dan konsultasi. Untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Semoga dokumen ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja secara optimal pada tahun mendatang.

Banjarn, Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. SONI HARISON, AP., S.Sos, M.Si
NIP. 197511061994121001





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Banjar menunjukkan kinerja sangat baik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan strategis. LKIP ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014.

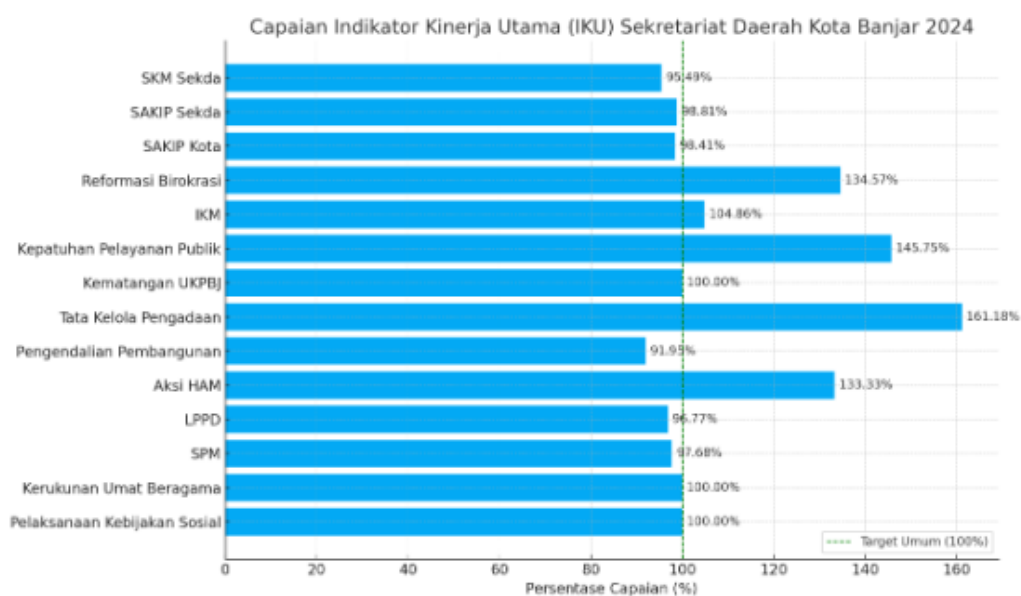
1. Capaian Kinerja Utama

Terdapat 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan dari 3 sasaran strategis. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh indikator berada pada kategori "Tinggi" dengan beberapa capaian seperti :

- Indeks Tata Kelola Pengadaan : 161,18%
- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik : 145,75%
- Nilai Aksi HAM : 133,33%
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 104,86
- Nilai SAKIP Sekretariat Daerah : 98,81

Berikut adalah grafik capaian masing-masing **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Sekretariat Daerah Kota Banjar tahun 2024.

Gambar . Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024



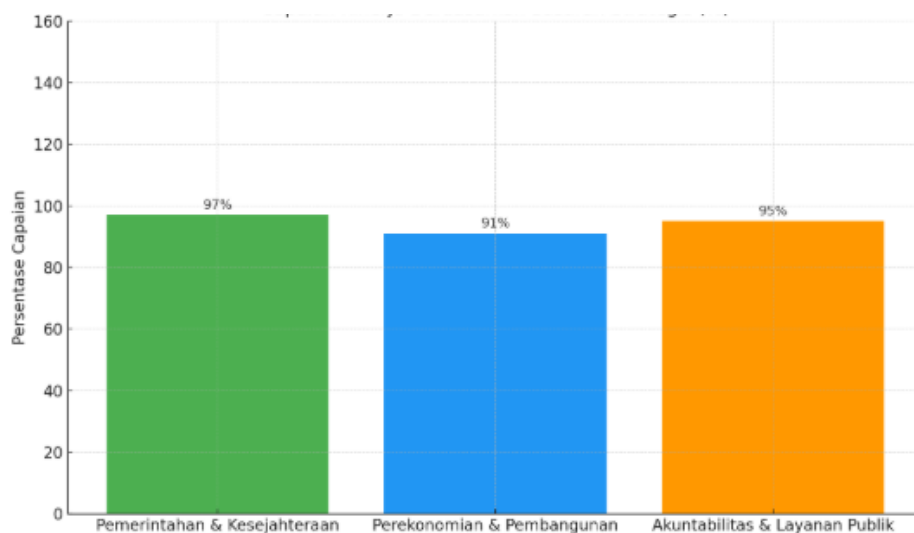


Terlihat bahwa sebagian besar indikator melampaui target 100%, seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan (161,18%), Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (145,75%), dan Nilai Aksi HAM (133,33%).

2. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

Berikut adalah grafik capaian kinerja berdasarkan tiga sasaran strategis utama Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024. Semuanya menunjukkan capaian yang tinggi, mencerminkan kinerja yang baik secara keseluruhan.

**Gambar . Capaian Kinerja Berdasarkan Tiga Sasaran Strategis Utama
Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024**



Grafik diatas menunjukkan rata-rata capaian 3 sasaran strategis : Pemerintahan & Kesejahteraan (97%), Perekonomian & Pembangunan (91%), dan Akuntabilitas & Pelayanan Publik (95%).

3. Efisiensi Anggaran

Anggaran Sekretariat Daerah Kota Banjar yang bersumber dari APBD untuk capaian program dan kegiatan pada Tahun 2024 dalam upaya mencapai sasaran strategis, yaitu sebesar Rp 30.683.212.684,00. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 33.971.511.599,00. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Desember yaitu sebesar Rp. 31.980.057.066,00 sehingga efisiensi anggaran yang dicapai Sekretariat Daerah Kota Banjar sebesar Rp. 1.991.454.533,00,00 atau 5,9%.



4. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa tantangan yang masih perlu ditangani :

- Kualitas perencanaan dan sistem akuntabilitas belum optimal
- Komitmen pegawai belum merata
- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM

5. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

- Menyelaraskan dokumen Renstra, anggaran, dan pelaporan
- Meningkatkan pembinaan dan komitmen pimpinan serta pegawai
- Meningkatkan kompetensi SDM secara konsisten dan terencana

LKIP Tahun 2024 mencerminkan keberhasilan nyata Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan hasil capaian yang tinggi dan efisiensi penggunaan anggaran yang signifikan, Sekretariat Daerah menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 KELEMBAGAAN DAN KERAGAMAN SUMBERDAYA.....	3
1.3.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah.....	3
1.3.2 Tupoksi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Keragaman Sumber Daya Manusia	7
1.3.5 Sarana dan Prasarana Aparatur.....	9
1.4 LANDASAN HUKUM	10
1.5 ISU STRATEGIS.....	11
1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1. LATAR BELAKANG	19
2.1.1. Sasaran Strategis	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Kebijakan Strategis, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023.....	28
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	40
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH.....	56
3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Persentase Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD dan Standar Nasional	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB IV PENUTUP.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Banjar Berdasarkan Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Banjar sampai dengan 31 Desember 2023	9
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Perubahan Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2018 – 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 2 Keterkaitan Sekretariat Daerah Kota Banjar dengan Misi Pembangunan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Keterkaitan Program Pendukung/Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjar dengan Misi Pembangunan Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 5 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 6 Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 7 Target Kinerja yang Diperjanjikan Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2023	30
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Daerah Kota Banjar Tahun 2023	31
Tabel 2. 9 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretaris Daerah Kota Banjar Tahun 2023	32
Tabel 2. 10 Anggaran Belanja Sasaran Strategis Pada Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2023	34
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3 Keterangan Kategori Penilaian Akhir	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Persentase Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD dan Standar Nasional	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Perangkat Daerah dengan



suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Banjar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjar sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar dengan telah dibentuknya Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar melalui penetapan dan penjabaran yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Banjar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Isi LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjar selama Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Banjar Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan serta realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Memberikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan



pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

5. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjar pada tahun yang akan datang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjar yang mengacu pada tujuan pembangunan Kota Banjar Tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang serta dapat memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra.

1.3 KELEMBAGAAN DAN KERAGAMAN SUMBERDAYA

1.3.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penunjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kota Banjar selalu berupaya meningkatkan kinerja dalam semua aspek, termasuk diantaranya penerapan *Good Governance*. Pada implementasinya, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

1.3.2 Tupoksi

Sekretariat Daerah Kota Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja



Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Banjar mempunyai Susunan Organisasi yang terdiri sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.

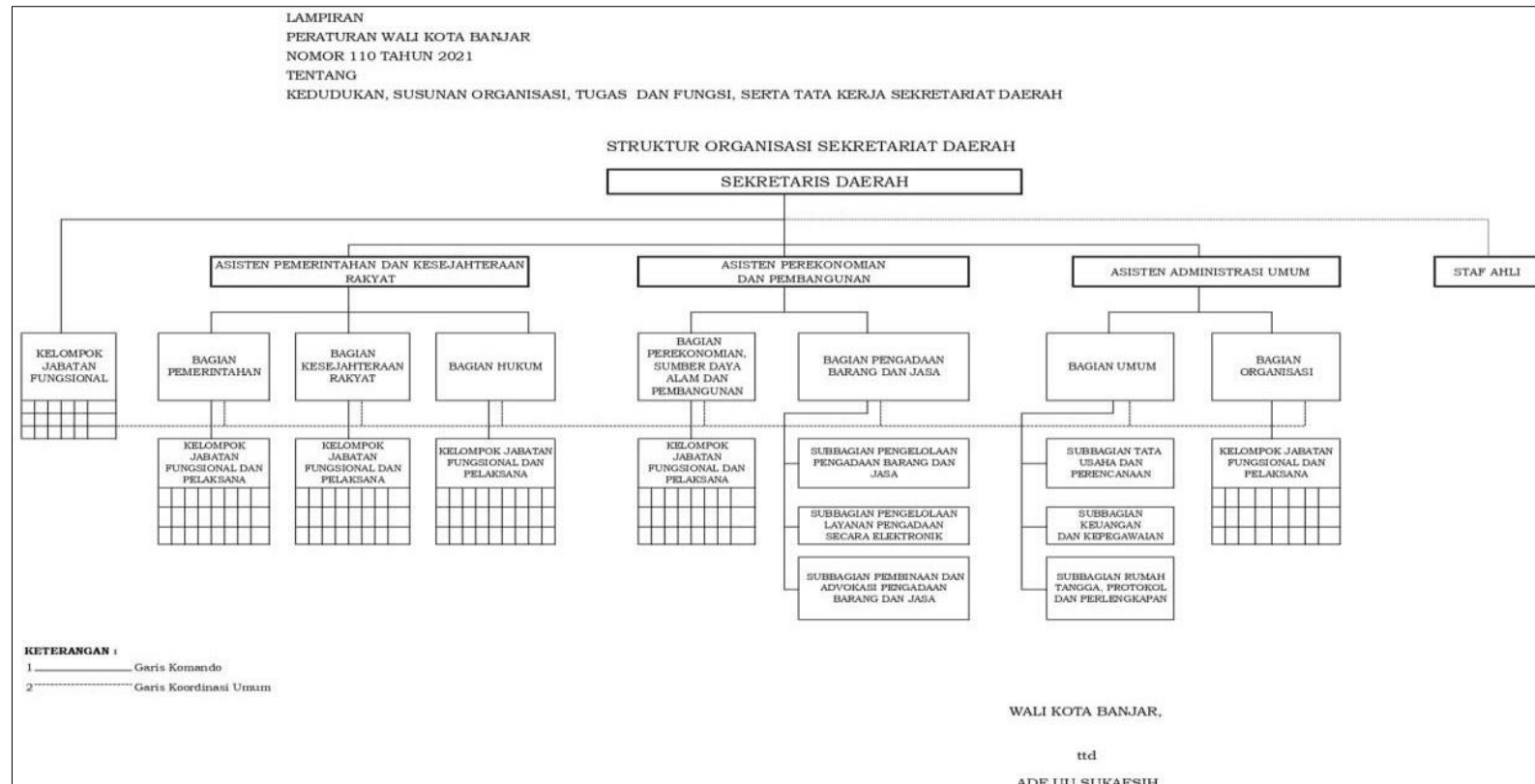


2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - Subbagian Tata Usaha dan Perencanaan;
 - Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - Subbagian Rumah Tangga, Protokol dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Berikut struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar dapat ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar



1.3.4 Keragaman Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam rangka menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sampai dengan tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Banjar di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 182 orang, PNS Sebanyak 95 orang, PPPK sebanyak 13 Orang, Tenaga Pendukung (Non ASN) 74 orang. Komposisi SDM Sekretariat Daerah Kota Banjar dikelompokkan berdasarkan kualifikasi pendidikan, fungsi, status kepegawaian dan Golongan / Ruang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Banjar
Per 31 Maret Tahun 2025**

No	Klasifikasi Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin			
	Sekretaris Daerah	1		
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1		
	Asisten Administrasi Umum		1	
	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	1		
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	1		
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia		1	
	Analisis Kebijakan Ahli Utama	1		
	Bagian Umum	63	24	
	Bagian Organisasi	3	8	
	Bagian PBJ	15	7	
	Bagian PSDAP	8	7	
	Bagian Hukum	8	7	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	6	
	Bagian Pemerintahan	6	6	
JUMLAH		114	68	182
2.	Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan(Pendidikan Terakhir)			
	S-3	2		
	S-2	14	9	
	S-1	26	28	
	D-4	2	4	
	D-3		2	
	D-2			
	D-1	1		
	SMA	17	3	
	SMP			
	SD			
JUMLAH		62	46	108
3	Komposisi Tenaga Honorer Berdasarkan Jenjang Pendidikan (Pendidikan Terakhir)			
	S-3			
	S-2	1		
	S-1	9	12	
	D-4			
	D-3	3	1	
	D-2			
	D-1			
	SMA	30	9	
	SMP	8		
	SD	1		
JUMLAH		52	22	74
4	Komposisi Berdasarkan Golongan Ruang			
	IV/e			
	IV/d	2		
	IV/c	2	2	
	IV/b	6		
	IV/a	3	2	
	III/d	3	4	
	III/c	4	2	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	III/b	13	21	
	III/a	25	14	
	II/d	3	1	
	II/c	1		
	II/b			
	II/a			
JUMLAH		62	46	108

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024.

1.3.5 Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjar, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi prasarana fisik dan sarana / asset. Adapun sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Banjar . Untuk daftar rincian sarana dan prasarana kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Banjar
sampai dengan 31 Desember 2024

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
01	Tanah	19 Lokasi	Baik
02	Alat-Alat Besar	2 Unit	Baik
03	Alat-Alat Angkutan	220 Unit	Baik
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	41 Unit	Baik
05	Alat Pertanian	8 Unit	Baik
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.598 Buah	Baik
07	Alat Studio dan Alat komunikasi	140 Unit	Baik
08	Alat-Alat Kedokteran	1 Buah	Baik
09	Alat Laboratorium	38 Buah	Baik
10	Bangunan Gedung	32 Unit	Baik
11	Monumen	6 Unit	Baik
12	Jalan dan Jembatan	9 Unit	Baik
13	Bangunan Air/Irigasi	5 Buah	Baik
14	Instalasi	19 Buah	Baik
15	Jaringan	5 Buah	Baik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

16	Buku dan Perpustakaan	1.464 Buku	Baik
17	Barang Bercorak Kebudayaan	16 Buah	Baik

Sumber: : Sub Bagian Protokol, Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Namun barang inventaris tersebut masih perlu penyesuaian dengan jumlah pengguna, sehingga tidak terjadi jumlah barang lebih dari jumlah penggunanya, dan masih perlunya memperhatikan analisa kebutuhan barang, serta masih perlunya menginventarisasi barang berdasarkan kondisi akhir, sehingga kondisi akhir barang tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung kinerja organisasi atau perlu dilakukan pemeliharaan barang yang ada. Kemudian pola distribusi barang ke pengguna, masih perlu difokuskan pada kondisi beban kerja yang lebih tinggi, sehingga barang inventaris yang ada, berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024;
10. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
12. Surat Sekretariat Daerah Kota Banjar Nomor T/100.2/ /2025 Tanggal 03 Januari 2025 Perihal Permintaan Dokumen SAKIP Tahun 2025

1.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan Identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjar sebagai berikut :

1. Peningkatan Sinergitas Perumusan Kebijakan;
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Efektivitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
5. Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.



6. Efisiensi dalam penggunaan anggaran, pengawasan penggunaan dana dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
7. Perlunya Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai.
8. Peningkatkan pemahaman dan kinerja pelayanan maupun peningkatan disiplin kerja.
9. Koordinasi yang efektif antar perangkat daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kelancaran suatu kegiatan.
10. Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banjar
11. Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata.
12. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;
13. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan;
14. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan;
15. Pengelolaan aset yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan aset tetap pada tingkat Sekretariat Daerah Kota Banjar

1.6 ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjar pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Banjar. Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kota Banjar memiliki 3 Program, 19 Kegiatan, dan 60 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30.683.212.684,00. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 33.971.511.599,00. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Desember yaitu sebesar Rp. 31.980.057.066,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Anggaran Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	APBD 2024	APBD-P 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN - PERUBAHAN S/D TW IV	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN – PERUBAHAN 2024 (%)
SEKRETARIAT DAERAH	30.683.212.684	33.971.511.599	31.980.057.066	94,14



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.341.609.509	25.369.908.424	24.149.272.563	95,19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.500.000	4.500.000	4.500.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	500.000	500.000	500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000	500.000	500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	500.000	500.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.681.764.082	13.315.179.797	13.149.466.583	98,76
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.681.264.082	13.314.679.797	13.148.966.583	98,76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	500.000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		315.000.000	315.000.000	312.705.057	99,27
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	315.000.000	315.000.000	312.705.057	99,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.701.230.900	4.780.730.900	4.438.316.944	92,84
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	308.885.400	308.885.400	308.868.700	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.794.800	314.794.800	314.708.135	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.599.800	214.799.800	214.799.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.260.900	227.260.900	227.177.170	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	275.300.000	271.271.375	98,54



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	168.720.000	168.720.000	144.370.000	85,57
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.970.000	1.000.970.000	998.893.500	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000.000	2.270.000.000	1.958.228.564	86,27
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	877.346.300	961.751.350	920.184.228	95,68
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.998.300	599.998.300	559.276.300	93,21
	Pengadaan Mebel	29.930.000	29.930.000	29.900.070	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	247.418.000	331.823.050	331.007.858	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.424.990.650	2.424.990.650	2.208.193.049	91,06
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	433.000	43,30
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.960.650	580.960.650	544.549.324	93,73
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.880.000	288.880.000	287.858.725	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.554.150.000	1.554.150.000	1.375.352.000	88,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.804.866.977	2.245.461.927	2.142.043.962	95,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	748.057.440	798.057.440	785.877.720	98,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.067.537	633.032.487	544.341.781	85,99
	Pemeliharaan Mebel		35.000.000	35.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.182.000	540.182.000	540.091.550	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.560.000	149.190.000	147.147.794	98,63



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		546.436.800	336.820.000	240.000.000	71,25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	546.436.800	336.820.000	240.000.000	71,25
Penataan Organisasi		517.987.000	517.987.000	506.620.640	97,81
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	335.396.000	335.396.000	325.147.569	96,94
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.396.000	80.396.000	79.999.621	100
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	102.195.000	102.195.000	101.473.450	99,29
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		467.486.800	467.486.800	227.242.100	48,61
	Fasilitasi Keprotokolan	133.898.500	133.898.500	119.753.100	89,44
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	191.421.800	191.421.800		0
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	142.166.500	142.166.500	107.489.000	75,61
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		7.456.392.700	7.716.392.700	7.138.081.100	92,51
Administrasi Tata Pemerintahan		537.293.500	697.293.500	492.486.909	70,63
	Penataan Administrasi Pemerintahan	198.848.350	358.848.350	256.941.121	71,60
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	187.133.200	187.133.200	116.730.082	62,38
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	151.311.950	151.311.950	118.815.706	78,52
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		5.916.261.300	5.916.261.300	5.581.072.644	94,33
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.387.610.000	2.387.610.000	2.362.126.675	98,93
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.486.201.300	3.486.201.300	3.180.788.719	91,24
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	42.450.000	42.450.000	38.157.250	89,89
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		854.088.100	854.088.100	831.697.225	97,38
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	95.800.000	95.800.000	95.621.526	100
	Fasilitasi Bantuan Hukum	56.400.000	56.400.000	54.631.250	96,86



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	701.888.100	701.888.100	681.444.449	97,09
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	148.749.800	248.749.800	232.824.322	93,60
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	138.228.900	238.228.900	227.833.422	95,64
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.520.900	10.520.900	4.990.900	47,44
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	885.210.475	885.210.475	692.703.403	78,25
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	191.480.025	191.480.025	149.216.907	77,93
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	58.978.325	58.978.325	58.586.758	99,34
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	120.574.900	120.574.900	81.836.649	67,87
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	11.926.800	11.926.800	8.793.500	73,73
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	63.559.750	63.559.750	62.398.361	98,17
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	21.750.400	21.750.400	21.570.210	99,17
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	18.521.850	18.521.850	18.220.801	98,37
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	23.287.500	23.287.500	22.607.350	97,08
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	248.771.000	248.771.000	245.257.130	98,59
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40.723.000	40.723.000	40.673.100	100
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	158.825.000	158.825.000	155.386.000	97,83
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.223.000	49.223.000	49.198.030	100
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	381.399.700	381.399.700	235.831.005	61,83
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	344.700.000	344.700.000	208.681.755	60,54
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	14.200.000	14.200.000	10.864.150	76,51



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	22.499.700	22.499.700	16.285.100	72,38
--	------------	------------	------------	-------

1.7 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penulisan serta dasar hukum dan sistematika Laporan LAKIP Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (Rencana Aksi, Faktor Pendukung dan Faktor



Penghambatnya);

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Tindaklanjut Rekomendasi LHE Inspektorat.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjar merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2.1.1. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Banjar

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai dan memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Ketatalaksanaan Birokrasi yang Efektif,
Efisien, Bersih dan Melayani.

2.1.2. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjar

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama masa transisi pembangunan. Sasaran Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum.

Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan.



Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola dan Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Banjar

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan kemudian dirumuskan menjadi IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjar sebanyak 14 (empat belas) Indikator yang disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			FORMULASI/CARA PERHITUNGAN
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Ketatalaksanaan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani						
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	Jumlah Kebijakan bidang Kesos yang diusulkan dibagi kebijakan kesos yang ditetapkan kali 100 %
			Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama	Tuntas Utama	Tuntas Utama	Jumlah Capaian Kinerja Seluruh Urusan SPM / 6 Urusan SPM x 100%
			Nilai Aksi HAM Daerah	75	75	75	Hasil Evaluasi Direktorat Jendral HAM RI melalui KSP Serambi
			Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100%	100%	100%	Jumlah Kegiatan dibagi kegiatan dikali 100 %
			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Hasil Evaluasi/Opini Kemendagri



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50	60	75	Hasil Penilaian LKPP
			Nilai Kematangan UKPBJ	80	85	90	Hasil Penilaian MCP KPK
			Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	87	88	90	Jumlah OPD yang Realisasi (Keuangan dan Fisik) Diatas 90% / Total Jumlah OPD
		Meningkatnya tata kelola dan kualitas akuntabilitas kinerja birokrasi serta kinerja pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	65	72	73	Hasil Penilaian Ombudsman RI
			Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kota Banjar	79	79,5	80	SKM Unit Pelayanan x 25
			Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	Hasil Evaluasi/Opini Kemenpan RB
			Nilai SAKIP Kota Banjar	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi/Opini Kemenpan RB
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	72	73	73,5	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah
			Nilai SKM Sekretariat Daerah	85	85	85	(Total dari Nilai Persepsi per Unsur /Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang



2.1.4. Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Banjar didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen, Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra	Bagian Umum
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan SKPD Audited dan Unaudited
			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional
			5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja Kontrak, Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	
			8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Pajak/Perpanjangan STNK, Service dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak/Perpanjangan STNK, Service dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Inventaris Mebeler Kantor	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara /Direhab	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Organisasi					
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
				10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan		Tersedianya Fasilitas Keprotokolan				
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Tersedianya Fasilitas Komunikasi Pimpinan				
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan				
				11	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Dokumen Analisis Jabatan				
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Dokumen Pelayanan Pulik dan Dokumen Tata Laksana				
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen Peningkatan Kinerja dan Dokumen Reformasi Birokrasi				
			2.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan
										Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
										Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

			2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dan Dokumen Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dan Dokumen Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Dokumen Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumen Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Laporan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
	3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian PSDAP
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

			2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian PSDAP
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian PSDAP
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

Menurut Peraturan Menteri Pan dan RB No. 53 Tahun 2014 Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih



tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat Eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Pan dan RB No. 53 Tahun 2014 adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mengukur Dokumen Perjanjian Kinerja diperlukan target kinerja yang berfungsi menetapkan sasaran kinerja pegawai dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Maka target kinerja yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Kota Banjar pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 1
Target Kinerja yang Diperjanjikan Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1	Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%
		2	Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100%
		3	Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama (100%)
		4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (3,41)
		5	Nilai Aksi HAM Daerah	75,00
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan	1	Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	87,00
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	50,00
			Nilai Kematangan UKPBJ	9/9 (40,00)
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	65,00
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	79,00
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	BB
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	72,00
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	85,00

Mengacu kepada ketentuan diatas, Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Banjar Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut :



Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Daerah Kota Banjar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1	Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%
		2	Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100%
		3	Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama (100%)
		4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (3,41)
		5	Nilai Aksi HAM Daerah	75,00
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan	1	Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	87,00
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	50,00
			Nilai Kematangan UKPBJ	9/9 (40,00)
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	65,00
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	79,00
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	BB
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	72,00
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	85,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

UNSUR/PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGARAN Rp.	KETERANGAN APBD TA 2024
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.341.609.509,00	APBD TA 2024
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 7.456.392.700,00	APBD TA 2024
3 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 885.210.475,00	APBD TA 2024

Untuk Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Kota Banjar Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretaris Daerah Kota Banjar Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1	Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%
		2	Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100%
		3	Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama (100%)
		4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (3,41)
		5	Nilai Aksi HAM Daerah	75,00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan	1	Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	87,00
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	50,00
			Nilai Kematangan UKPBJ	9/9 (40,00)
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	65,00
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	79,00
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	BB
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	72,00
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	85,00

UNSUR/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 33.971.511.599,00	APBDP TA 2024
1 Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.369.908.424,00	APBDP TA 2024
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 7.716.392.700,00	APBDP TA 2024
3 Program Perekonomian danPembangunan	Rp. 885.210.475,00	APBDP TA 2024

Secara lengkap Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 1.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024, anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024,



tercantum dalam belanja operasi (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar
Rp 33.971.511.599,-

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Anggaran belanja Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Banjar yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024

NO			URAIAN	APBD 2024	APBDP 2024
5	1		Belanja Operasi	29.805.866.384	32.919.760.249
5	1	1	Belanja Pegawai	12.245.700.882	13.669.499.797
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	14.165.665.502	15.755.760.452
5	1	5	Belanja Hibah	3.394.500.000	3.494.500.000
5	2		Belanja Modal	877.346.300	1.051.751.350
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	877.346.300	1.051.751.350
JUMLAH BELANJA				30.683.212.684	33.971.511.599

Penjelasan terkait anggaran belanja untuk masing-masing program kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5

Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	APBD 2024	APBD-P 2024	BERTAMBAH/BERKURANG
SEKRETARIAT DAERAH	30.683.212.684	33.971.511.599	3.288.298.915
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.341.609.509	25.369.908.424	3.028.298.915
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000	500.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	500.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.681.764.082	13.315.179.797	1.633.415.715
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.681.264.082	13.314.679.797	1.633.415.715
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		315.000.000	315.000.000	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	315.000.000	315.000.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.701.230.900	4.780.730.900	1.079.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	308.885.400	308.885.400	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.794.800	314.794.800	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.599.800	214.799.800	14.200.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.260.900	227.260.900	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	275.300.000	75.300.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	168.720.000	168.720.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500.970.000	1.000.970.000	500.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000.000	2.270.000.000	470.000.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		877.346.300	961.751.350	84.405.050
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.998.300	599.998.300	-
	Pengadaan Mebel	29.930.000	29.930.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	247.418.000	331.823.050	84.405.050
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.424.990.650	2.424.990.650	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.960.650	580.960.650	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	288.880.000	288.880.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.554.150.000	1.554.150.000	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.804.866.977	2.245.461.927	440.594.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	748.057.440	798.057.440	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.067.537	633.032.487	44.964.950
	Pemeliharaan Mebel		35.000.000	35.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.182.000	540.182.000	130.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.560.000	149.190.000	90.630.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		546.436.800	336.820.000	- 209.616.800
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	546.436.800	336.820.000	- 209.616.800



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Penataan Organisasi		517.987.000	517.987.000	-
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	335.396.000	335.396.000	-
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.396.000	80.396.000	-
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	102.195.000	102.195.000	-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		467.486.800	467.486.800	-
	Fasilitasi Keprotokolan	133.898.500	133.898.500	-
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	191.421.800	191.421.800	-
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	142.166.500	142.166.500	-
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		7.456.392.700	7.716.392.700	260.000.000
Administrasi Tata Pemerintahan		537.293.500	697.293.500	160.000.000
	Penataan Administrasi Pemerintahan	198.848.350	358.848.350	160.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	187.133.200	187.133.200	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	151.311.950	151.311.950	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		5.916.261.300	5.916.261.300	-
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.387.610.000	2.387.610.000	-
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.486.201.300	3.486.201.300	-
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	42.450.000	42.450.000	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		854.088.100	854.088.100	-
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	95.800.000	95.800.000	-
	Fasilitasi Bantuan Hukum	56.400.000	56.400.000	-
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	701.888.100	701.888.100	-
Fasilitasi Kerja Sama Daerah		148.749.800	248.749.800	100.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	138.228.900	238.228.900	100.000.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.520.900	10.520.900	-
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	885.210.475	885.210.475	-
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	191.480.025	191.480.025	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	58.978.325	58.978.325	-
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	120.574.900	120.574.900	-
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	11.926.800	11.926.800	-
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	63.559.750	63.559.750	-
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	21.750.400	21.750.400	-
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	18.521.850	18.521.850	-
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	23.287.500	23.287.500	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	248.771.000	248.771.000	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40.723.000	40.723.000	-
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	158.825.000	158.825.000	-
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.223.000	49.223.000	-
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	381.399.700	381.399.700	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	344.700.000	344.700.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	14.200.000	14.200.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	22.499.700	22.499.700	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi Sekretariat Daerah Kota Banjar yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$71,90 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara Menghitung Persentase Capaian Indikator Kinerja
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **Progress Positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau



semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **Progress Negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR

Sekretariat Daerah Kota Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah Kota Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai



Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	KET
					(5/4*100%)		(5/7*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1 Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100	100%	100	
		2 Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100%	100%	100	100%	100	
		3 Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama (100%)	Tuntas Utama (97,68%)	97,68	Tuntas Utama (100%)	97,68	
		4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (3,41)	Sedang (3,30)	96,77	Tinggi (3,41)	96,77	Hasil EPPD Tahun 2024 atas LPPD Kota Banjar Tahun 2023 Belum menghasilkan nilai kinerja karena masih dalam proses penilaian oleh Timnas., sehingga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya
		5 Nilai Aksi HAM Daerah	75	100	133,33	75	133,33	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan;	1	Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	87%	80%	91,95	90%	88,89	
		2	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Cukup (50)	Baik (80,59)	161,18	75,00	107,45	
		3	Nilai Kematangan UKPBJ	9/9 (40,00)	9/9 (40,00)	100	9/9 (40,00)	100	
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	B (65,00)	A (94,74)	145,75	73,00	129,78	
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	B (79,00)	B (82,84)	104,86	B (80,00)	103,55	
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,00)	A- (80,74)	134,57	B (60,00)	134,57	Indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum menghasilkan realisasi kinerja Tahun 2024 karena masih dalam proses penilaian oleh Kemenpan RB., sehingga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	BB (70,00)	B (68,89)	98,41	BB (70,00)	98,41	
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	BB (72,00)	BB (71,14)	98,81	BB (73,5)	96,79	
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	B (85,00)	B (81,17)	95,49	B (85,00)	95,49	
		Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)				111,34			



Berdasarkan tabel diatas Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 sebesar 111,34% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ini hamper sebagian besar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah direncanakan pada Renstra Sekretariat Daerah. Rata-rata capaian kinerja tersebut dihasilkan dari jumlah kumulatif persentase capaian kinerja 14 (empat belas) indikator yang diampu oleh setda berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026.

Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024 ini belum menghasilkan keseluruhan nilai, dikarenakan masih terdapat indikator kinerja yang belum menghasilkan realisasi nilai sehingga masih dihitung berdasarkan realisasi nilai tahun sebelumnya seperti Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indeks Reformasi Birokrasi yang masih dalam proses penilaian di tingkat pusat (Kemendagri dan Kemenpan RB). Selanjutnya Mekanisme Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja 1 :

Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Penilaian Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial mencakup pengukuran efektivitas kebijakan, program, dan layanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengevaluasi dampaknya. Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan menilai sejauh mana kebijakan dan program kesejahteraan sosial telah diimplementasikan sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengukuran Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}_{2024}} \times 100\%$$

Indikator kinerja Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial diampu oleh Bagian Kesejahteraan



Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar. Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja 2 :

Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis dengan saling menghormati dan toleransi.

Mekanisme pengukuran Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama diperoleh dengan cara membandingkan target pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama yang direncanakan dengan realisasi permasalahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama yang terselesaikan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

Indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar. Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Tahun 2024 sebesar 100%.

3. Indikator Kinerja 3 :

Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh suatu badan layanan umum terhadap masyarakat.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disebutkan dalam undang-undang pemerintah daerah meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;



- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- e. Sosial.

Mekanisme pengukuran Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperoleh melalui tahapan penerapan SPM berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu :

- a. Pengumpulan Data;
- b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda. Gubernur menyampaikan laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda dan menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pengukuran kinerja Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperoleh dengan cara menghitung Jumlah Capaian Kinerja Seluruh Urusan SPM / 6 Urusan SPM x 100%. Perhitungan ini dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah Tuntas Utama (100%) dengan realisasi kinerja 97,68%. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 sebesar 97,68%.

4. Indikator Kinerja 4 :

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang



memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Mekanisme pengukuran Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian EPPD atas LPPD Tahun 2023, yaitu melalui verifikasi oleh Tim Pemerintah Daerah (Timda) dalam hal ini BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Hasil verifikasi dari Timda tersebut berupa kategori LPPD Tingkat Regional (Provinsi) yang kemudian dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Timnas). Hasil validasi dari Timnas berupa kategori LPPD tingkat nasional. Mekanisme evaluasi seperti itu memungkinkan terdapat perbedaan kategori antara Timda dan Timnas.

Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah Tinggi (3,41). Namun untuk kinerja tahun 2024 sampai saat ini belum menghasilkan realisasi kinerja. Hal ini dikarenakan hasil EPPD Tahun 2024 atas LPPD Kota Banjar Tahun 2023 masih dalam proses penilaian oleh Timnas (Kemendari), sehingga untuk pengukuran capaian kinerja masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya yaitu Sedang (3.30).

5. Indikator Kinerja 5 :

Nilai Aksi HAM Daerah

Nilai Aksi HAM Daerah atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM di tingkat daerah yang merupakan penjabaran dari RANHAM. Tujuan dari penyusunan RANHAM adalah untuk menyinergikan upaya P5HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM, dan mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM.

Pelaporan pelaksanaan RANHAM merupakan penyampaian hasil pelaksanaan keseluruhan Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem yang dikelola oleh Sekretariat Bersama RANHAM. Mekanisme pengukuran Nilai Aksi HAM Daerah diperoleh melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.



Menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi HAM melalui sistem pemantauan pada periode :

- 28 Maret - 5 April;
- 28 Juni - 5 Juli;
- 28 September - 5 Oktober; dan
- 28 Desember - 5 Januari.

b. Sekretariat Bersama.

- Menerima/mengumpulkan masukan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap triwulan;
- Menyampaikan laporan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan Aksi HAM triwulanan untuk disampaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- Menyusun laporan pelaksanaan RANHAM untuk disampaikan kepada Presiden;
- Melakukan publikasi laporan pelaksanaan RANHAM.

c. Keluaran : Berkas laporan.

Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah 75,00 dengan realisasi kinerja 100. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Nilai Aksi HAM Daerah Tahun 2024 sebesar 133,33%.

6. Indikator Kinerja 6 :

Prosentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%

Mekanisme pengukuran Prosentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90% diperoleh dengan cara menghitung jumlah perangkat daerah yang realisasi (keuangan dan fisik) diatas 90% / Total jumlah perangkat daerah. Perhitungan ini dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam danPembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan indikator ini adalah 87% dengan realisasi kinerja 80%. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Prosentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90% Tahun 2024 sebesar 91,95%.



7. Indikator Kinerja 7 :

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut menjadi lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Selain itu ITKP digunakan juga sebagai salah satu bahan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan (Berdasarkan SE Kepala LKPP RI No 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan ITKP Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'ANTARA' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi) dengan mekanisme pengukuran sebagai berikut :

ITKP	=	Nilai SiRUP + Nilai E-Tendering + Nilai E-Purchasing + Nilai Non E-Tendering/Non E-Purchasing + Nilai E-Kontrak + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ
------	---	---

Hasil perhitungan nilai untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), sebagai berikut :

Interval Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
100	ISTIMEWA
> 90 s.d < 100	SANGAT BAIK
> 70 s.d 90	BAIK
≥ 50 s.d 70	CUKUP
< 50	KURANG



Indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar. Pada Tahun 2024 target yang direncanakan untuk indikator ini adalah 50,00 dengan realisasi kinerja 80,59. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 sebesar 161,18%.

8. Indikator Kinerja 8 :

Nilai Kematangan UKPBJ

Indikator tingkat kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level pro aktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator, dengan mekanisme pengukuran sebagai berikut :

Nilai indikator tingkat kematangan UKPBJ	=	(capaian kematangan Proaktif : jumlah variabel) x bobot indikator
--	---	---

Hasil perhitungan nilai untuk Indikator tingkat kematangan UKPBJ, sebagai berikut :

Capaian Kematangan	Nilai
9/9	40,00
8/9	35,56
7/9	31,11
6/9	26,67
5/9	22,22
4/9	17,78
3/9	13,33
2/9	8,89
1/9	4,44
0/9	0,00

Indikator kinerja Nilai Kematangan UKPBJ diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar. Pada Tahun 2024 target yang direncanakan untuk indikator ini adalah 9/9 (40,00) dengan realisasi kinerja 9/9 (40,00). Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kematangan UKPBJ Tahun 2024 sebesar 100%.



9. Indikator Kinerja 9 :

Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dan lembaga publik di Indonesia memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mekanisme Pengukuran Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian Ombudsman RI. Sehubungan dengan itu, Ombudsman RI telah melaksanakan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2024. Dalam Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan. Adapun dimensi penilaian sebagai berikut:

- a. Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan dengan bobot nilai 21,85%.
- b. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik dengan bobot nilai 32,37%.
- c. Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi dengan bobot nilai 24,24%.
- d. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan dengan bobot nilai 21,54%.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Penilaian tersebut juga dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.



Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar adalah hasil akumulasi nilai dari masing-masing lokus penilaian. Terhadap penyelenggara pelayanan yang pernah menerima hasil pengawasan Ombudsman RI berupa laporan hasil analisis, laporan akhir hasil pemeriksaan atau rekomendasi, pada hasil penilaian akhir akan diberikan catatan tambahan atas pelaksanaan hasil pengawasan tersebut.

Tahapan Pelaksanaan :

1. Persiapan terdiri dari :
 - a. Penyusunan konsep penilaian
 - b. Pembuatan aplikasi
 - c. Lokarya awal
 - d. Sosialisasi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan terdiri dari :
 - a. Pengambilan Data
 - b. Verifikasi Data
 - c. Kontrol Kualitas Data
 - d. Pengolahan Data
 - e. Finalisasi Data
 - f. Lokakarya akhir
3. Penyusunan Hasil Penilaian adalah laporan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tingkat Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Penyerahan Hasil Penilaian.

Pada Tahun 2024 target yang direncanakan untuk indikator ini adalah B (65,00) dengan Opini Kualitas Sedang dengan realisasi kinerja A (94,74) dengan Opini Kualitas Tertinggi. Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 sebesar 145,75%.

10. Indikator Kinerja 10 :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah proses pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang dilakukan melalui



survei dan analisis data untuk mengetahui persepsi masyarakat dan sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan

Mekanisme pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar diperoleh melalui penghitungan survei kepuasan masyarakat, dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

- Penyiapan Bahan dalam Bentuk Kuisioner;
 - Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data berupa :
 - a. Jumlah responden, dan
 - b. Lokasi dan waktu pengumpulan data
- Metode Pengolahan Data berupa :

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-rata Tertimbang” masingmasing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0.11) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Perhitungan ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar.



Pada Tahun 2024 target yang direncanakan untuk indikator ini adalah B (79,00) dengan realisasi kinerja B (82,84). Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Indeks IKM Kota Banjar Tahun 2024 sebesar 104,86%.

11. Indikator Kinerja 11 :

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Mekanisme pengukuran Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Hasil Evaluasi/Opini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penilaian dilakukan melalui Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Eksternal. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di internal pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim inspektorat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya Inspektorat melakukan review dan membuat kompilasi PMPRB. Kompilasi tersebut menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Hasil PMPRB kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan Evaluasi Eksternal untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga dapat dihasilkan Indeks Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah B (60,00). Namun untuk kinerja tahun 2024 sampai saat ini belum menghasilkan realisasi kinerja. Hal ini dikarenakan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi masih dalam proses penilaian oleh Kemenpan RB, sehingga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya yaitu A- (80,74).



12. Indikator Kinerja 12 :

Nilai SAKIP Kota Banjar

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Mekanisme pengukuran Evaluasi SAKIP Kota Banjar merupakan Hasil Evaluasi/Opini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
- b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- c. Pembahasan dan revidi draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- d. Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE); dan
- e. Penyebaran dan pengkomunikasian Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Setelah dihasilkan LHE atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi APIP Inspektorat, disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Wali Kota. Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PANRB, sehingga dapat dihasilkan Nilai SAKIP Kota Banjar.

Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah BB (70,00) dengan realisasi kinerja B (68,89). Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kota Banjar Tahun 2024 sebesar 98,41%.



13. Indikator Kinerja 13 :

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Mekanisme pengukuran SAKIP Sekretariat Daerah merupakan Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi disamping evaluasi terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar. Pada Tahun 2024 target kinerja yang direncanakan untuk indikator ini adalah BB (72,00) dengan realisasi kinerja sebesar BB (71,14). Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar 98,81%.

14. Indikator Kinerja 14 :

Nilai SKM Sekretariat Daerah

Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada perangkat daerah bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan.

Mekanisme pengukuran Nilai Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik menganalisis hasil survei untuk merumuskan rencana perbaikan pelayanan. Survei yang digunakan berupa kuesioner pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil survey dan rencana perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik melaporkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi. Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei



Kepuasan Masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota dan digunakan sebagaibahan penyusun kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja Nilai Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah diampu oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjar. Pada Tahun 2024 target yang direncanakan untuk indikator ini adalah B (85,00) dengan realisasi kinerja B (81,17). Sehingga Presentase Realisasi Capaian Kinerja Nilai Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar 95,49%.

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Banjar telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 – 2026. Untuk Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencakup 3 (tiga) Sasaran dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja.

Pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026, Sekretariat Daerah tujuan dan sasaran pembangunan, yaitu :

Tujuan :

Meningkatkan ketatalaksanaan Birokrasi yan efektif, efisien, bersih dan melayani

Sasaran :

- Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum;
- Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan;
- Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 serta Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 yang telah disepakati, dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran untuk mengetahui capaian kinerja di Tahun 2024. Adapun tabel realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1 Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	100%	100%
		2 Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	-	-	100%	100%
		3 Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama (100%)	Tuntas Utama (95,50%)	Tuntas Utama (100%)	Tuntas Utama (97,68%)
		4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (3,41)	Sedang (3,30)	Tinggi (3,41)	Sedang (3,30)
		5 Nilai Aksi HAM Daerah	-	-	75,00	100
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan;	1 Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	85,00%	84%	87%	80%
		2 Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	-	Cukup (50)	Baik (80,59)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		3	Nilai Kematangan UKPBJ	-	-	9/9 (40,00)	9/9 (40,00)
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	73,00	91,93	B (65,00)	A (94,74)
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	79,00	82,33	B (79,00)	B (82,84)
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,00)	A (80,74)	B (60,00)	A- (80,74)
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	B (81,00)	B (68,30)	BB (70,00)	B (68,89)
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,00	71,14	BB (72,00)	BB (71,14)
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	85,00	81,03	B (85,00)	B (81,17)

Tabel diatas menjelaskan Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjar yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan 1 Tujuan, 3 Sasaran, dan 14 Indikator Kinerja. Terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja yaitu Tahun 2023 terdapat 10 indikator kinerja dan Tahun 2024 terdapat 14 indikator kinerja. Penambahan indikator kinerja tersebut yaitu :

- a. Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Indikator Kinerja Baru mulai Tahun 2024 pada Bagian Kesra);
- b. Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (Indikator Kinerja Baru mulai Tahun 2024 pada Bagian Kesra);
- c. Nilai Aksi HAM Daerah (Berubah dari Indikator Penilaian Kota Peduli HAM menjadi Nilai Aksi HAM Daerah mulai Tahun 2024 pada Bagian Hukum);
- d. Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kinerja Baru mulai Tahun 2024 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa);
- e. Nilai Kematangan UKPBJ (Indikator Kinerja Baru mulai Tahun 2024 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa).



Berdasarkan pencapaian realisasi atas target yang telah diperjanjikan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dijabarkan pencapaiannya sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah 2023 dan 2024

- Mencapai Target :

1) Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pada Tahun 2023 indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 91,93 dan Tahun 2024 juga telah mencapai target dengan realisasi sebesar 94,74. Sehingga mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 2,81.

2) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar

Pada Tahun 2023 indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 82,33 dan Tahun 2024 juga telah mencapai target dengan realisasi sebesar 82,84. Sehingga mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,51.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Pada Tahun 2023 indikator ini telah mencapai target dengan realisasi sebesar 80,74 dan Tahun 2024 juga telah mencapai target dengan realisasi sebesar 82,84. Sehingga mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,51.

4) Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar

Pada Tahun 2023 belum menjadi indikator kinerja Sekretariat Daerah dan mulai menjadi indikator kinerja pada Tahun 2024. Target kinerja yang diperjanjikan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

5) Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Pada Tahun 2023 belum menjadi indikator kinerja Sekretariat Daerah dan mulai menjadi indikator kinerja pada Tahun 2024. Target kinerja yang diperjanjikan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.



6) Nilai Aksi HAM Daerah

Pada Tahun 2023 indikator ini sebelumnya adalah Penilaian Kota Peduli HAM dan untuk Tahun 2024 berubah menjadi Indikator Nilai Aksi HAM Daerah. Hal ini dikarenakan Penilaian Kota Peduli HAM perhitungan nilainya dilakukan oleh Kemenkum HAM dan tidak pasti setiap tahun dapat menghasilkan realisasi. Ini menyebabkan nilai yang dicapai menjadi tidak konsisten. Selanjutnya pada Tahun 2024 indikator Penilaian Kota Peduli HAM berubah menjadi Nilai Aksi HAM Daerah yang memiliki target kinerja sebesar 75,00 dengan realisasi sebesar 100. Sehingga indikator ini telah mencapai target signifikan secara maksimal.

7) Nilai Kematangan UKPBJ

Pada Tahun 2023 belum menjadi indikator kinerja Sekretariat Daerah dan mulai menjadi indikator kinerja pada Tahun 2024. Target kinerja yang diperjanjikan sebesar 9/9 (40,00) dengan realisasi sebesar 9/9 (40,00). Sehingga indikator ini telah mencapai target secara maksimal.

8) Indeks Tata Kelola Pengadaan

Pada Tahun 2023 belum menjadi indikator kinerja Sekretariat Daerah dan mulai menjadi indikator kinerja pada Tahun 2024. Target kinerja yang diperjanjikan sebesar 50,00 dengan realisasi sebesar 80,59. Sehingga indikator ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

- Belum Mencapai Target :

1) Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan realisasi sebesar Tuntas Utama 95,50% dan Tahun 2024 juga belum mencapai target dengan realisasi sebesar Tuntas Utama 97,68. Realisasi tersebut walaupun belum mencapai target namun mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 2,18.



2) Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan realisasi Sedang (3,30) dan Tahun 2024 Hasil EPPD Tahun 2024 atas LPPD Kota Banjar Tahun 2023 Belum menghasilkan nilai kinerja karena masih dalam proses penilaian oleh Timnas., sehingga masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya sebesar Sedang (3,30).

3) Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan realisasi sebesar 84% dan Tahun 2024 juga belum mencapai target dengan realisasi sebesar 80%. Realisasi tersebut belum mencapai target dan mengalami penurunan realisasi kinerja sebesar 4%.

4) Nilai SAKIP Kota Banjar

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan realisasi sebesar 68,89 dan Tahun 2024 juga belum mencapai target dengan realisasi sebesar Tuntas Utama 70,00. Realisasi tersebut walaupun belum mencapai target namun mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 1,11.

5) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah;

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan realisasi sebesar 71,14 dan Tahun 2024 juga belum mencapai target dengan realisasi sebesar Tuntas Utama 73,5. Realisasi tersebut walaupun belum mencapai target namun mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 2,36.

6) Nilai SKM Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2023 indikator ini belum mencapai target dengan realisasi sebesar 81,17 dan Tahun 2024 juga belum mencapai target dengan realisasi sebesar Tuntas Utama 85,00. Realisasi tersebut walaupun belum mencapai target namun mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 3,83.



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Realisasi Kinerja di Level Nasional

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 yang telah disepakati, dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD dan standar nasional. Adapun dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD dan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Target Nasional	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1 Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100%	-	100%	100
		2 Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100%	-	100%	100
		3 Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tuntas Utama (100%)	Tuntas Utama (100%)	Tuntas Utama (97,68%)	97,68
		4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi (3,41)	-	Sedang (3,30)	96,77
		5 Nilai Aksi HAM Daerah	75,00	-	100	133,33
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan;	1 Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	87%	-	80%	91,95
		2 Indeks Tata Kelola Pengadaan	Cukup (50)	-	Baik (80,59)	161,18
		3 Nilai Kematangan UKPBJ	9/9 (40,00)	-	9/9 (40,00)	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	B (65,00)	-	A (94,74)	145,75
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	B (79,00)	-	B (82,84)	104,86
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,00)	-	A- (80,74)	134,57
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	BB (70,00)	-	B (68,89)	98,41
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	BB (72,00)	-	BB (71,14)	98,81
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	B (85,00)	-	B (81,17)	95,49

Tabel diatas menjelaskan bahwa hanya indikator Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat dibandingkan dengan standar nasional berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian indikator kinerja utama tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat yang harus dihadapi yang dijelaskan sebagai berikut :

a. FAKTOR PENDORONG PENCAPAIAN KINERJA

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan Monitoring dan Evaluasi pada seluruh bagian dari beberapa Sistem Aplikasi Perangkat Daerah;
- 2) Terjalannya koordinasi yang baik antar bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjar yang dikoordinasikan oleh Sub Bagian TU dan Perencanaan dalam hal dalam hal target kinerja, realisasi capaian kinerja dan anggaran serta monitoring evaluasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Renja dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dalam hal pengawasan target dan realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala



untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;

- 3) Tersusunnya tata hubungan kerja yang sesuai tugas dan fungsi;
- 4) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;

b. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 1) Belum adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah;
- 2) Terbatasnya ruang penyimpanan arsip;
- 3) Terkendalanya serapan anggaran sub kegiatan dikarenakan adanya Batasan pagu uang persediaan untuk pencairan setiap bulannya sehingga tidak mampu untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan pencairan anggaran Program/Kegiatan setiap anggaran;
- 4) Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran kas setiap bulannya sehingga terdapat beberapa kegiatan yang menganggarkan melebihi kebutuhan kinerjanya untuk triwulan tersebut.
- 5) Perubahan peraturan perundang-undangan secara makro dan cepat, sehingga dapat mengakibatkan kurang konsistennya kebijakan yang dikeluarkan;
- 6) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan untuk Meningkatkan Indikator yang Belum Memenuhi Target

- 1) Akan dilakukan perbaikan atas kelangsungan koordinasi dengan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah dalam proses pemantauan target kinerja dan realisasi capaian Program/Kegiatan;
- 2) Akan dilakukan evaluasi keuangan setiap bulannya untuk mengetahui kebutuhan penganggaran prioritas yang dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- 3) Tetap mematuhi proses perencanaan sesuai dengan KAK yang telah dibuat;
- 4) Penyusunan KAK yang lebih baik lagi pada setiap bagian, sehingga dalam pemantauan capaian kinerja dan keuangan dapat lebih sinkron dan maksimal;



- 5) Melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Anggaran Kas yang telah disusun sehingga penyerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya indikator kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 merupakan Penyerapan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Program 2024 (%)	Realisasi Kinerja Program 2024 (%)	Anggaran Program 2024	Realisasi Anggaran Program 2024	Persentase Capaian Kinerja (%)	Persentase Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1 Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100	100	Rp 7.716.392.700	Rp 7.138.081.100	100	92,51	7,49
		2 Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
		3 Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan		Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		Minimal (SPM)										
		4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
		5 Nilai Aksi HAM Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum							
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan;	1 Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	100	Rp 885.210.475	Rp 692.703.403	100	78,25	21,75
		2 Indeks Tata Kelola Pengadaan		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
		3 Nilai Kematangan UKPBJ		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	83,33	Rp 25.369.908.424	Rp 24.149.272.563	83,33	95,19	-11,86
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar		Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
		3	Indeks Reformasi Birokrasi		Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar		Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
--	--	---	------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--



Sekretariat Daerah Kota Banjar melaksanakan kegiatan melalui APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 30.683.212.684,00. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 33.971.511.599,00. Berdasarkan tabel diatas dapat dihasilkan rata-rata penyerapan anggaran sebesar : 88,65%, rata-rata capaian kinerja sebesar : 94,44 % dan rata-rata tingkat efisiensi sebesar : 5,79%

Berikut dijabarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan 3 Program yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar, yaitu :

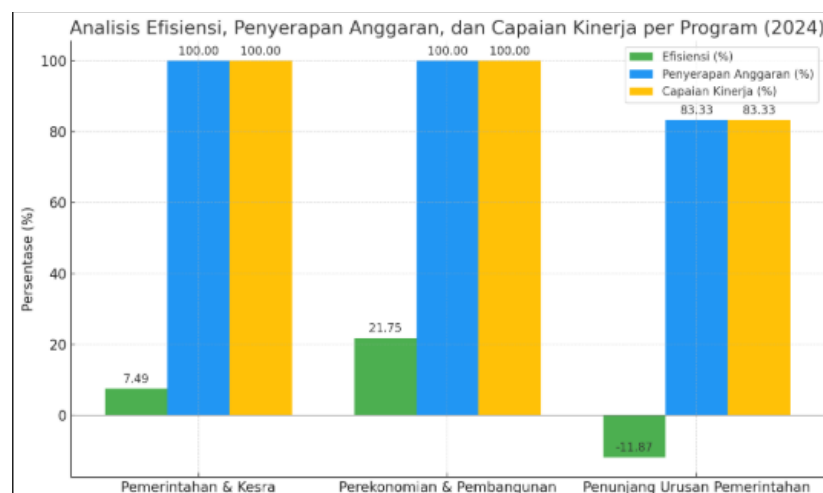
- | | |
|--|--|
| 1. Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota | Menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi sebesar 95,19% namun hanya menghasilkan capaian kinerja sebesar 83,33%. Hal ini menyebabkan efisiensi sumber daya yang dihasilkan yaitu efisiensi negatif sebesar -11,86% yang menandakan adanya perencanaan yang kurang tepat sasaran dan alokasi sumber daya yang tidak optimal. |
| 2. Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat | Menunjukkan penyerapan anggaran yang tinggi sebesar 92,51% dengan capaian kinerja maksimal sebesar 100%. Hal ini menyebabkan efisiensi sumber daya sebesar 7,49% yang mengindikasikan bahwa meskipun target tercapai , masih terdapat potensi untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. |
| 3. Program Perekonomian dan
Pembangunan | Menunjukkan penyerapan anggaran yang belum maksimal |

sebesar 78,25% tetapi mampu mencapai target kinerja sebesar 100%. Hal ini menyebabkan efisiensi sumber daya tertinggi sebesar 21,75% yang menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dengan output maksimal meski dengan anggaran yang lebih hemat.

Selanjutnya ditampilkan visualisasi grafik dari data efisiensi penggunaan sumber daya untuk tiga program utama Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024:

Gambar 3.1

Grafik Efisiensi, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Kinerja per Program

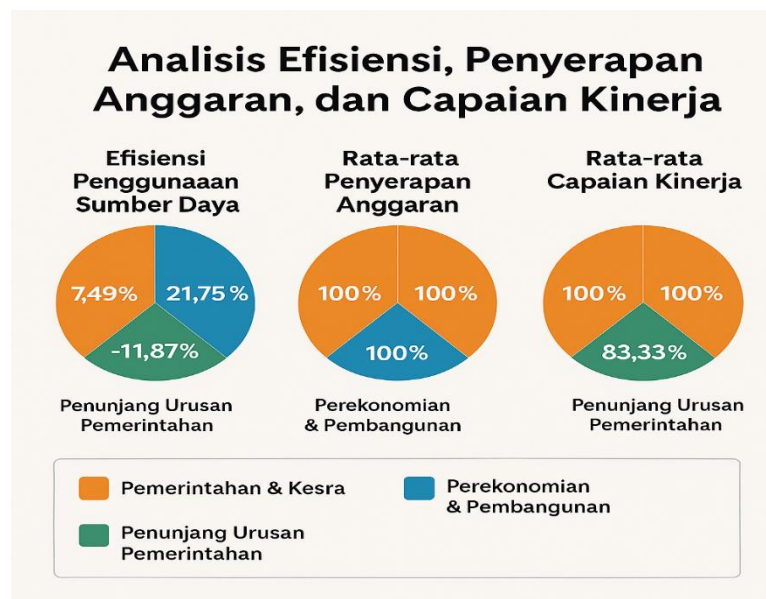


Berdasarkan grafik diatas menggambarkan Penyerapan Anggaran pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan menyerap anggaran secara maksimal dengan capaian 100%, sedangkan untuk Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hanya menyerap anggaran sebesar 83,33%. Untuk Capaian Kinerja pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan

Pembangunan mencapai 100%, sedangkan Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 83,33%.

Hal tersebut menghasilkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Program Perekonomian & Pembangunan menunjukkan efisiensi tertinggi sebesar 21,75%, sementara untuk Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan hasil efisiensi kurang optimal yang menunjukkan ketidakefisienan sebesar -11,87%.

Gambar 3.1
Gambaran Analisis Efisiensi, Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2024



6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Terdapat 3 Program 19 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9) Penataan Organisasi

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

10) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Administrasi Tata Pemerintahan

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan



- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3) Fasilitas dan Koordinasi Hukum

- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitas Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

4) Fasilitas Kerja Sama Daerah

- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik



- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air



3.4. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran Keuangan Sekretariat Daerah

PROGRAM/K EGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Belanja				Keluaran (Output)						Hasil (Outcome)					
		Target	Realisasi	Sisa	%	Uraian	Target		Realisasi		%	Uraian	Target		Realisasi		%
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12		13		14
SEKRETARIAT DAERAH		33.324.530 .024	31.515.187 .085	1.809.342. 939	94,57		100	%	95,96	%	95,96		100	%	95,96	%	95,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	25.369.908 .424	24.149.272 .563	1.220.635. 861	95,19	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	87,88	%	87,88	Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	87,88	%	87,88



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4.500.000	4.500.000	-	100,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	%	100,00	%	100	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100,00	%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-	100,00	Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra	2	do k	2,00	d o k	100	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2	do k	2,00	do k	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000	-	100,00	Dokumen RKA-SKPD	2	do k	2,00	d o k	100	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	2	do k	2,00	do k	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	500.000	-	100,00	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	do k	2,00	d o k	100	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	do k	2,00	do k	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000	500.000	-	100,00	Dokumen DPA-SKPD	2	do k	2,00	d o k	100	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	2	do k	2,00	do k	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	500.000	500.000	-	100,00	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	do k	2,00	d o k	100	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	do k	2,00	do k	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	500.000	500.000	-	100,00	Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	8	lap	8,00	la p	100	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	8	lap	8,00	la p	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	-	100,00	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	lap	4,00	lap	100	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	lap	4,00	lap	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	13.315.179.797	13.149.466.583	165.713.214	98,76	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%	100	%	100	Peningkatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.314.679.797	13.148.966.583	165.713.214	98,76	Gaji dan Tunjangan ASN	108	Orang/bulan	108	Orang/bulan	100	Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN sebanyak 108 orang	108	Orang/bulan	108	Orang/bulan	100	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	-	100,00	Laporan Keuangan SKPD Audited dan Unaudited	2	lap	2	lap	100	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	lap	2	lap	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	315.000.000	312.705.057	2.294.943	99,27	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	%	100	%	100	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	315.000.000	312.705.057	2.294.943	99,27	Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional	13	dok	13	dok	100	Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional	13	dok	13	dok	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.780.730.900	4.438.316.944	342.413.956	92,84	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	308.885.400	308.868.700	16.700	99,99	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	pa ket	12	p a k e t	100	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	pa ket	12	pa ke t	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	314.794.800	314.708.135	86.665	99,97	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	pa ket	12	p a k e t	100	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	pa ket	12	pa ke t	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	214.799.800	214.799.500	300	100,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	pa ket	12	p a k e t	100	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	pa ket	12	pa ke t	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	227.260.900	227.177.170	83.730	99,96	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	pa ket	12	p a k e t	100	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	pa ket	12	pa ke t	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	275.300.000	271.271.375	4.028.625	98,54	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	pa ket	12	p a k e t	100	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	pa ket	12	pa ket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Per-UU yang Disediakan	168.720.000	144.370.000	24.350.000	85,57	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12	do k	12	d o k	100	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12	do k	12	do k	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.970.000	998.893.500	2.076.500	99,79	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lap	12	la p	100	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	lap	12	la p	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.270.000.000	1.958.228.564	311.771.436	86,27	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	12	la p	100	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	12	la p	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	961.751.350	920.184.228	41.567.122	95,68	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100
	Pengadaa n Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	599.998.300	559.276.300	40.722.000	93,21	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Un it	1	U ni t	100	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Un it	1	U nit	100
	Pengadaa n Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29.930.000	29.900.070	29.930	99,90	Inventaris Mebeler Kantor	41	Un it	41	U ni t	100	Tersedianya Inventaris Mebeler Kantor	41	Un it	41	U nit	100
	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	331.823.050	331.007.858	815.192	99,75	Peralatan dan Perlengkap an Kantor	33	Un it	33	U ni t	100	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33	Un it	33	U nit	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.424.990.650	2.208.193.049	216.797.601	91,06	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1.000.000	433.000	567.000	43,30	Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12	Lap	100	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12	Lap	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	580.960.650	544.549.324	36.411.326	93,73	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Lap	12	Lap	100	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Lap	12	Lap	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	288.880.000	287.858.725	1.021.275	99,65	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Lap	12	Lap	100	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Lap	12	Lap	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.554.150.000	1.375.352.000	178.798.000	88,50	Jasa Tenaga Kerja Kontrak, Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	12	Lap	12	Lap	100	Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja Kontrak, Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	12	Lap	12	Lap	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.245.461.927	2.142.043.962	103.417.965	95,39	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	%	100	%	100	Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	798.057.440	785.877.720	12.179.720	98,47	Pajak/Perpanjangan STNK, Service dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39	Unit	39	Unit	100	Terbayarnya Pajak/Perpanjangan STNK, Service dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39	Unit	39	Unit	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	633.032.487	544.341.781	88.690.706	85,99	Pajak/Perpanjangan STNK, Service dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19	Unit	19	Unit	100	Terbayarnya Pajak/Perpanjangan STNK, Service dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19	Unit	19	Unit	100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	35.000.000	35.000.000	-	100,00	Inventaris Mebeler Kantor	3	Unit	3	Unit	100	Terpeliharanya Inventaris Mebeler Kantor	3	Unit	3	Unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	540.182.000	540.091.550	90.450	99,98	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara /Direhab	3	Unit	3	Unit	100	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara /Direhab	3	Unit	3	Unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	149.190.000	147.147.794	2.042.206	98,63	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129	Unit	129	Unit	100	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129	Unit	129	Unit	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Bangunan Lainnya																	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	336.820.000	240.000.000	96.820.000	71,25	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dikelola	100	%	100	%	100	Peningkatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	100	%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	336.820.000	240.000.000	96.820.000	71,25	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang/ Bulan	1	Orang/ Bulan	100	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang/ Bulan	1	Orang/ Bulan	100
Penataan Organisasi		Cakupan Penataan Organisasi	517.987.000	506.620.640	11.366.360	97,81	Persentase Penataan Organisasi	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Organisasi	100	%	100	%	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Analisis Jabatan	335.396.000	325.147.569	10.248.431	96,94	Dokumen Kelembagaan, Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan	2	do k	2	d o k	100	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan, Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan	2	do k	2	do k	100
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.396.000	79.999.621	396.379	99,51	Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Tersusunnya Dokumen Tata Laksana	2	lap	2	la p	100	Terfasilitasinya Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Tersusunnya Dokumen Tata Laksana	2	lap	2	la p	100
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	102.195.000	101.473.450	721.550	99,29	Dokumen Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, Tersusunnya Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	2	do k	2	d o k	100	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, Tersusunnya Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	2	do k	2	do k	100
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	467.486.800	227.242.100	240.244.700	48,61	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	%	66,67	%	66,67	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	%	66,67	%	66,67
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil	133.898.500	119.753.100	14.145.400	89,44	Fasilitas Keprotokolan	12	La p	12	L a p	100	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan	12	La p	12	La p	100



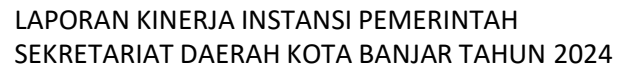
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		Fasilitasi Keprotokolan (laporan)																
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (laporan)	191.421.800		191.421.800	0,00	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	Lap	0	Lap	0	Tersedianya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	Lap	0	Lap	0
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (laporan)	142.166.500	107.489.000	34.677.500	75,61	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Lap	12	Lap	100	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Lap	12	Lap	100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Cakupan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7.716.392.700	7.138.081.100	578.311.600	92,51	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	100	%	100
Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Tata Pemerintahan		697.293.500	492.486.909	204.806.591	70,63	Persentase Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan	100	%	100	%	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

							Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)											
							Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)											
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (dokumen)	358.848.350	256.941.121	101.907.229	71,60	Tersusunnya Bahan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan	1	do k	1	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	do k	1	do k	100
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (dokumen)	187.133.200	116.730.082	70.403.118	62,38	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Kewilayahan	5	do k	5	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	do k	5	do k	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	151.311.950	118.815.706	32.496.244	78,52	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyelengg	6	do k	6	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Otonomi Daerah	6	do k	6	do k	100

92



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (dokumen)	3.486.201.300	3.180.788.719	305.412.581	91,24	Tersusunnya Bahan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan dan Dokumen Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2	do k	2	do k	100
--	---	---	---------------	---------------	-------------	-------	---	---	---------	---	-------------	-----	---	---	---------	---	---------	-----



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (dokumen)	42.450.000	38.157.250	4.292.750	89,89	Tersusunnya Bahan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan dan Dokumen Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2	do k	2	do k	100
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	854.088.100	831.697.225	22.390.875	97,38	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	100	%	100	%	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (dokumen)	95.800.000	95.621.526	178.474	99,81	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	4	do k	4	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4	do k	4	do k	100
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (kasus)	56.400.000	54.631.250	1.768.750	96,86	Terfasilitasinya Bantuan Hukum	2	ka su s	2	k a s u s	100	Terfasilitasinya Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	ka su s	2	ka su s	100
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Informasi Hukum yang Didokumentasi (dokumen)	701.888.100	681.444.449	20.443.651	97,09	Terdokumentasinya Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Dokumen Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2	do k	2	do k	100
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	248.749.800	232.824.322	15.925.478	93,60	Persentase Kerjasama Daerah	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	100	%	100	%	100
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (dokumen)	238.228.900	227.833.422	10.395.478	95,64	Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2	do k	2	do k	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (laporan)	10.520.900	4.990.900	5.530.000	47,44	Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Kerja Sama	1	Lap	1	Lap	100	Tersedianya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	1	Lap	1	Lap	100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perekonomian Dan Pembangunan	885.210.475	692.703.403	192.507.072	78,25	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	%	100	%	100
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	191.480.025	149.216.907	42.263.118	77,93	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian	100	%	100	%	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (dokumen)	58.978.325	58.586.758	391.567	99,34	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	dok	2	dok	100	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	dok	2	dok	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (laporan)	120.574.900	81.836.649	38.738.251	67,87	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	do k	4	d o k	100	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	do k	4	do k	100
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (dokumen)	11.926.800	8.793.500	3.133.300	73,73	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	do k	2	do k	100
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	63.559.750	62.398.361	1.161.389	98,17	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	100	%	100	%	100
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (dokumen)	21.750.400	21.570.210	180.190	99,17	Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1	do k	1	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	do k	1	do k	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (laporan)	18.521.850	18.220.801	301.049	98,37	Terselenggaranya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	do k	2	do k	100
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (laporan)	23.287.500	22.607.350	680.150	97,08	Terselenggaranya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	do k	2	do k	100
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	248.771.000	245.257.130	3.513.870	98,59	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	100	%	100	%	100	Peningkatan Pemenuhan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	100	%	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif					Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif											
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan											
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen)	40.723.000	40.673.100	49.900	99,88	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	do k	4	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	do k	4	do k	100
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (laporan)	158.825.000	155.386.000	3.439.000	97,83	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	do k	3	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3	do k	3	do k	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (orang)	49.223.000	49.198.030	24.970	99,95	Terselenggaranya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5	Orang	5	Orang	100	Tersedianya Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5	Orang	5	Orang	100
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	381.399.700	235.831.005	145.568.695	61,83	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Ditetapkan	100	%	100	%	100	Peningkatan Kualitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	%	100	%	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	344.700.000	208.681.755	136.018.245	60,54	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2	dok	2	dok	100	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	2	dok	2	dok	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		Tenaga Kerja (dokumen)																
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (dokumen)	14.200.000	10.864.150	3.335.850	76,51	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	do k	2	d o k	100	Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	do k	2	do k	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (dokumen)	22.499.700	16.285.100	6.214.600	72,38	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2	do k	2	d o k	100	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	do k	2	do k	100
--	--	---	------------	------------	-----------	-------	---	---	---------	---	-------------	-----	---	---	---------	---	---------	-----



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Daerah Kota Banjar melaksanakan kegiatan melalui APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 30.683.212.684,00. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 33.971.511.599,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.980.057.066,00 atau sebesar 94,14%, dengan rincian sebagai berikut :

a. **Belanja Operasi**

Anggaran Murni Belanja Operasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 29.805.866.384,00. Mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 32.919.760.249,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 30.970.287.721,00 atau sebesar 94,08%, dengan perincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

- **Belanja Pegawai**, Anggaran Murni sebesar Rp. 12.245.700.882,00. Mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 13.669.499.797,00 dan selama Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 13.406.966.583,00 atau 98,08%.
- **Belanja Barang dan Jasa**, Anggaran Murni sebesar Rp. 14.165.665.502,00. Mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 15.755.760.452,00 dan selama Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 14.358.321.138,00 atau 91,13%.
- **Belanja Hibah**, Anggaran Murni sebesar Rp. 3.394.500.000,00. Mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 3.494.500.000,00 dan selama Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 3.205.000.000,00 atau 91,72%.

b. **Belanja Modal**

Anggaran Murni Belanja Modal Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 877.346.300,00. Mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 1.051.751.350,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.009.769.345,00 atau sebesar 96,01%, dengan perincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**, Anggaran Murni sebesar Rp. 877.346.300,00. Mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 1.051.751.350,00 dan selama Tahun 2024 telah terealisasi sebesar



Rp. 1.009.769.345,00 atau 96,01%.

- **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,** Anggaran sebesar Rp. 0 sehingga tidak ada realisasi yang dihasilkan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Banjar digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2024 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjar sudah baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Secara garis besar hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Banjar tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 pencapaian kinerjanya diarahkan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 3 (tiga) Program Utama Sekretariat Daerah Kota Banjar yang bersumber dari dana APBD yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian indikator Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum	1 Cakupan Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100	Tinggi
		2 Persentase Pembinaan dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	100	Tinggi
		3 Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	97,68	Tinggi
		4 Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	96,77	Tinggi
		5 Nilai Aksi HAM Daerah	133,33	Tinggi
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Perekonomian Pembangunan;	1 Persentase Pengendalian Pembangunan Perangkat Daerah yang Realisasi Kegiatannya di atas 90%	91,95	Tinggi
		2 Indeks Tata Kelola Pengadaan	161,18	Tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

		3	Nilai Kematangan UKPBJ	100	Tinggi
3	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	145,75	Tinggi
		2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banjar	104,86	Tinggi
		3	Indeks Reformasi Birokrasi	134,57	Tinggi
		4	Nilai SAKIP Kota Banjar	98,41	Tinggi
		5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	98,81	Tinggi
		6	Nilai SKM Sekretariat Daerah	95,49	Tinggi

Sekretariat Daerah Kota Banjar menghasilkan kriteria penilaian kinerja Tinggi dengan seluruh indikator kinerja utama (IKU) mencapai hasil yang Tinggi

2. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Banjar yang bersumber dari APBD untuk capaian program dan kegiatan pada Tahun 2024 dalam upaya mencapai sasaran strategis, yaitu sebesar Rp 30.683.212.684,00. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 33.971.511.599,00. Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Desember yaitu sebesar Rp. 31.980.057.066,00 sehingga efisiensi anggaran yang dicapai Sekretariat Daerah Kota Banjar sebesar Rp. 1.991.454.533,00,00 atau 5,9%.
3. Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kota Banjar diantaranya perlu dilakukan :
 - a. **Integrasi Dokumen Perencanaan**
Diperlukan adanya sinkronisasi Renstra, RKA, DPA, dan dokumen evaluasi secara berkala melalui pelatihan teknis dan supervisi.
 - b. **Penguatan Komitmen**
Melakukan pembinaan rutin dan monitoring berjenjang bagi pejabat dan pegawai terhadap penerapan akuntabilitas kinerja pemerintahan/SAKIP.
 - c. **Peningkatan Kapasitas SDM**
Mengadakan pelatihan teknis dan manajerial untuk seluruh ASN Sekretariat Daerah Kota Banjar
 - d. **Optimalisasi Sarana dan Prasarana**
Melakukan inventarisasi ulang dan distribusi ulang asset sesuai beban kerja dan kebutuhan riil



- e. Digitalisasi Proses Kerja**
Meningkatkan pelayanan berbasis digital terutama dalam pengelolaan dokumen dan layanan publik.
4. Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan Penganggaran yang Kurang Optimal**
Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum maksimal
 - b. Komitmen Pejabat dan Pegawai**
Belum merata dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP)
 - c. Kualitas dan Kuantitas SDM**
Masih terdapat gap kompetensi dan jumlah pegawai.
 - d. Masalah Pelayanan Administratif**
 - Layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan perlu ditingkatkan;
 - Pelaporan dan pengarsipan administrasi belum tertata rapi.
5. Rencana tindak lanjut dalam upaya perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjar sebagai berikut :
 - a. Revisi Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Kota Banjar**
Perlu ditargetkan penyusunan Renstra dan Renja yang lebih responsif terhadap capaian dan permasalahan actual pada tahun perencanaan yang akan datang.
 - b. Evaluasi Rutin Triwulanan**
Melakukan evaluasi program/kegiatan per triwulan untuk mendeteksi masalah lebih awal.
 - c. Pemetaan Kebutuhan SDM**
Melakukan mapping kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja dan rencana jangka menengah.
 - d. Penguatan Koordinasi Antar Bagian**
Membangun sistem koordinasi lintas bagian berbasis agenda bersama dan target layanan terpadu.
 - e. Audit Internal Tahunan**
Menerapkan sistem audit internal untuk menilai implementasi tindak lanjut rekomendasi setiap tahun.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024

Hal ini akan menjadi kan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik pada Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Banjar, Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. SONI HARISON, AP., S.Sos, M.Si
NIP. 197511061994121001